

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN WADUK SEMPOR BAGI MASYARAKAT KEBUMEN TAHUN 1958 – 1978**

Oleh: Puji Astuti, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [puji.asti1996@gmail.com](mailto:puji.asti1996@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pasca kemerdekaan, pembangunan di Indonesia dipusatkan pada sektor pertanian. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yaitu melakukan perbaikan terhadap sarana irigasi melalui pembuatan waduk. Kegiatan pembangunan waduk pada pemerintahan Presiden Soekarno salah satunya adalah Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk; mengetahui kondisi tanah dan pertanian Kabupaten Kebumen 1958 – 1978 mengetahui proses pembangunan Waduk Sempor, mengetahui dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Sempor bagi masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pembangunan waduk, kondisi tanah di Desa Sempor yaitu sangat gersang terutama saat musim kemarau, sedangkan kondisi pertanian di Kabupaten Kebumen sebelum dilakukan pembangunan Waduk Sempor hanya dapat menanam tanaman padi satu kali. Kondisi demikian karena hanya mengandalkan sawah tadah hujan. Persiapan pembangunan Waduk Sempor dilaksanakan sejak tahun 1958 yang dimulai dengan perencanaan bendungan, proses pembebasan tanah dan ganti rugi tanah masyarakat, hingga diselesaikan dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1978 oleh Presiden Soeharto. Beberapa dampak pembangunan Waduk Sempor yaitu meningkatnya produksi pertanian, menanggulangi banjir, serta menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Kebumen.

**Kata Kunci:** Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, Sosial Ekonomi.

***ECONOMIC SOCIAL EFFECT OF SEMPOR RESERVOIR CONSTRUCTION FOR KEBUMEN REGENCY SOCIETY IN 1958 – 1978***

***Abstract***

After the independent day, Indonesian buildings focused on agriculture sector. One of the government efforts to increase agriculture production result is by doing improvement on irrigation facility through the tank construction. One of the tank constructions in Ir. Soekarno era is Sempor Reservoir, which is located in Sempor sub-district, Kebumen regency, Central Java. This research aims to find out the soil condition and Kebumen agriculture in 1958-1978, the construction process of Sempor Reservoir, and also the economic social effect of Sempor Reservoir construction for Kebumen regency society. Therefore, the result of this research shows that before the construction, the soil condition in Sempor village is really dry, especially in dry season. Meanwhile, the agriculture condition in Kebumen regency in the same time is only available to plant paddy for once. This is happened because the farms only depend on rainfed rice fields. The preparation of Sempor Reservoir construction held in 1958, which is started by tank planning, the process of soil releasing and people's compensating. It is done and inaugurated in 1 March 1978 by Soeharto. Some of the building effects of Sempor Reservoir are the increase of agriculture production, the overcome of flood, and being the charm of Kebumen excursion.

**Keywords:** Sempor Reservoir ,Kebumen Regency, Economic Social.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pertanian adalah hal yang sangat mendasar bagi masyarakat di Indonesia yang memiliki keadaan alam yang begitu menguntungkan untuk digunakan dalam kegiatan pertanian pedesaan.<sup>1</sup> Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian. Usaha untuk meningkatkan produksi pertanian juga diimbangi dengan pembangunan waduk.

Pembangunan waduk merupakan salah satu proses dalam pengembangan bidang pertanian. Pembangunan waduk di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, berfungsi untuk menampung air yang jumlahnya berlebihan ketika musim hujan. Air yang ditampung dapat dimanfaatkan sebagai pengairan saat musim kemarau untuk pertanian. Ketersediaan air yang cukup mampu meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di Indonesia. Pertanian dalam perkembangannya menjadi pusat perhatian pemerintah dan terus ditingkatkan dalam setiap tahunnya. Tujuan pembangunan pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri yang diharapkan nantinya dapat mencapai perekonomian yang semakin seimbang.

Salah satu tujuan dari adanya pembangunan waduk tersebut yaitu kegiatan irigasi. Irigasi sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 yang merupakan akibat diterapkannya Politik Etis. Politik Etis atau yang biasa disebut dengan politik balas budi merupakan suatu kebijakan yang menitik beratkan pada tiga hal yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.<sup>2</sup> Namun, dalam kebijakan Politik Etis tersebut yang seharusnya digunakan untuk pertanian masyarakat pribumi dalam kenyataannya irigasi digunakan untuk

kepentingan perkebunan swasta yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda.<sup>3</sup>

Tahun 1942, di Indonesia terjadi transformasi dalam hal sistem pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Pemerintah Belanda digantikan dengan Pemerintah Jepang. Pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia, proses eksploitasi kekayaan di negeri jajahan dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia dengan tujuan untuk mengeksploitasi kekayaan untuk kepentingan perang. Keadaan ini berfungsi untuk meningkatkan pertanian di negeri jajahan. Sumber daya alam yang sangat menguntungkan di Indonesia menjadi pusat perhatian masa pemerintahan Jepang.

Sektor pertanian pada pemerintahan Jepang sangat diutamakan dan diunggulkan karena digunakan untuk pasokan makanan demi kebutuhan perang yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pertanian tersebut salah satunya dengan adanya pembangunan irigasi. Irigasi yang mampu meningkatkan hasil produksi pertanian memberikan keuntungan pihak Jepang dalam upaya memenuhi bahan makanan dalam perang.<sup>4</sup>

Pembangunan untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan industri di Indonesia setelah kemerdekaan diterapkan dalam program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun disesuaikan dengan kebutuhan pertanian khususnya produksi beras sebagai bahan makanan pokok yang paling penting.<sup>5</sup> Proyek-proyek yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian salah satunya dengan membangun

---

<sup>1</sup>Long Norman, *Pengantar Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1977), hlm. 3.

<sup>2</sup>John S. Ambler, *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 7.

---

<sup>3</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 31.

<sup>4</sup>Denik Kharisma Sari dan Nawiyanto, "Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1945", *Artikel*, Universitas Negeri Jember, 2014, hlm. 4.

<sup>5</sup>Amirudin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 32.



waduk. Waduk memiliki fungsi utama sebagai irigasi dan memiliki fungsi lain yaitu sebagai pencegah banjir dan pembangkit listrik tenaga air. Pada era Soekarno berhasil membangun beberapa waduk seperti Waduk Tjatiaban di Tegal, Waduk Djatiluhur di Jawa Barat, dan Waduk Darma di Kuningan.<sup>6</sup>

Pada masa pemerintahan Soeharto diterapkan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Kebijakan yang paling diutamakan yaitu untuk mencapai swasembada dalam produksi pertanian terutama beras. Swasembada beras terjadi pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1984. Pemerintah meningkatkan produksi beras melalui pengenalan benih-benih baru yang cocok dengan pupuk kimia untuk meningkatkan jumlah produksi beras petani. Dukungan pemerintah selain pengenalan benih baru juga dilakukan pengembangan irigasi dan kelembagaan sampai pada tingkat petani. Upaya yang dilakukan pemerintah memberikan hasil dengan tercapainya swasembada beras.<sup>7</sup>

Pengembangan perekonomian di Indonesia dengan prinsip REPELITA dimulai sejak REPELITA I pada tahun 1969 – 1974 dengan memusatkan perhatian pada bidang pertanian dan dilanjutkan pada REPELITA II tahun 1974 – 1979. REPELITA II dimulai tahun 1974 dengan menggunakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam REPELITA I menjadi titik tolak dalam pelaksanaan REPELITA II. Sasaran REPELITA II dalam upaya pembangunan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat seperti dengan tersedianya sandang dan pangan. Pengaruh REPELITA II dalam sektor pertanian yaitu adanya kenaikan produksi pertanian yang pesat antara lain dengan perbaikan dan juga penyempurnaan irigasi yang mencapai hingga 500 ribu ha, sedangkan pembangunan jaringan

irigasi baru kurang lebih 500 ribu ha.<sup>8</sup> Pembangunan terus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi tercapainya keseimbangan dalam sektor pertanian di Indonesia.

Pertanian merupakan sebuah kultur tradisi utama dalam kehidupan sejak dahulu dan menjadi basis perekonomian masyarakat pedesaan di Pulau Jawa. Ketersediaan air yang cukup merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya dalam keberhasilan program pembangunan pertanian yakni dengan dibangunnya waduk di berbagai tempat untuk meningkatkan kegiatan irigasi pertanian, di antaranya pembangunan Waduk Sempor di Kebumen. Pembangunan Waduk Sempor ini berada di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Waduk Sempor merupakan waduk serbaguna dan memiliki banyak fungsi yang dibangun berdasarkan program REPELITA pada masa Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Waduk Sempor memberikan suplesi irigasi seluas 6.478 ha sawah yang ada di beberapa wilayah sekitar waduk. Selain itu, Waduk Sempor juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan produksi minimal 6.000.000 KWH pada saat pengairan.

## METODE PENELITIAN

Metode atau *Methodos* dalam bahasa Yunani berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan objek penelitian. Pada studi sejarah, diperlukan pula metode sejarah yang bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah masa lampau.

Metode dalam sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara benar.<sup>9</sup> Metode penelitian sejarah diantaranya adalah Heuristik, yakni

<sup>6</sup>Rantjangan *Undang-Undang Tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*, Biro Perantjang Negara, hlm. 68.

<sup>7</sup>Suryana A. dan Hermanto, *Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional Ekonomi Padi dan Beras Nasional*, (Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2001), hlm. 87.

<sup>8</sup>Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 450.

<sup>9</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 64

kemampuan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Dalam tahapan ini peneliti harus menemukan dokumen yang relevan dengan apa yang akan dituliskan. Sumber sejarah dapat pula diklasifikasikan menjadi sumber primer atau sumber utama dan juga sumber sekunder atau sumber kedua. Tahapan verifikasi ini digunakan untuk menentukan autentisitas atau keaslian sumber dan kredibilitas sumber sejarah.<sup>10</sup> Semua sumber yang diperoleh, dikritik sebelum digunakan sebagai sumber sejarah. Tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan kritik eksteren (luar) terlebih dahulu kemudian ke tahap kritik intern (dalam). Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Dalam pencarian fakta sejarah ini terbagi menjadi dua cara yaitu dengan sintesis dan analisis. Terakhir adalah historiografi atau penulisan adalah suatu kegiatan dengan merekonstruksi peristiwa sejarah secara kronologis dan sistematis. Dalam tahap ini peneliti menggunakan model penulisan sejarah analitis, yaitu penulisan sejarah yang fokus pada pokok permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. KONDISI TANAH DAN PERTANIAN DI KEBUMEN

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang termasuk dalam Karesidenan Kedu. Kabupaten Kebumen terletak di pesisir pantai selatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga disebut dengan Kedu Selatan. Kabupaten Kebumen terletak pada 162 km sebelah barat daya dari Kota Semarang yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kondisi geografis merupakan dasar dari penataan lingkungan. Lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dan berfungsi sebagai hal utama dalam kehidupan di bumi. Letak geografis Kabupaten Kebumen secara astronomis terletak pada 7<sup>o</sup> 27' - 7<sup>o</sup> 50' Lintang Selatan dan 109<sup>o</sup> 22' - 109<sup>o</sup>

<sup>10</sup>Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.47.

50' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Kebumen yaitu:<sup>11</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sekitar 128.111,50 ha atau 1.281.115 km<sup>2</sup>. Hamparan wilayah Kabupaten Kebumen mencakup dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, serta pantai selatan yang membentang luas. Bagian selatan merupakan dataran rendah, sedangkan bagian utara membentang perbukitan-perbukitan yang dikenal dengan Perbukitan Serayu Selatan. Perbukitan Serayu Selatan tersebut terdiri dari batuan tua atau batuan pasir. Kondisi geografis daerah pegunungan bagian utara tersebut yang mengakibatkan jalan pada daerah tersebut berupa tanjakan dan juga turunan tajam. Kondisi tanah di daerah pegunungan cenderung banyak terdapat batuan induk dan mengakibatkan mudah longsor.

Keberadaan air tanah juga berpengaruh terhadap kesuburan dan jenis-jenis tanah. Kabupaten Kebumen memiliki berbagai macam jenis tanah dan dapat dibedakan menjadi lima jenis tanah yaitu:<sup>12</sup>

1. Tanah Aluvial Kelabu, merupakan jenis tanah yang biasa digunakan untuk sawah, tanaman palawija, dan kebun kelapa. Jenis tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang beragam dari rendah hingga tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organik

<sup>11</sup>Kantor Badan Pusat Statistik Kebumen, *Kebumen dalam Angka 1978*, (Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 1978), hlm. 4.

<sup>12</sup> Agung Budi Susanto, "Faktor-faktor Sosial Ekonomi Budaya Yang Mempengaruhi Kesiediaan Calon Transmigrasi Kabupaten Kebumen Mengikuti Program Transmigrasi", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 1985), hlm. 45.



dari rendah hingga tinggi. Tanah ini terdapat di beberapa kecamatan seperti Kutowinangun, Prembun, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Kuwarasa, Gombong, Rowokele.

2. Tanah *Pedsolict*, merupakan jenis tanah yang tergolong rendah unsur hara. Namun, tanah ini masih cukup dalam dan kadar *litany* tinggi sehingga cocok untuk pengembangan lahan sawah yang membutuhkan lapisan bawah yang padat. Tanah *pedsolict* ini terdapat di Kecamatan Sadang, Alian Adimulyo, dan Sempor.
3. Tanah *Aluvial Lidromorf*, merupakan jenis tanah yang meliputi Kecamatan Buluspesantren, Klirong, dan Buayan.
4. Tanah *Regosol Coklat*, merupakan jenis tanah yang meliputi Kecamatan Mirit, Ambal, Petanahan, dan Puring.
5. Tanah *Litosol*, merupakan jenis tanah yang relatif masih muda, memiliki tekstur yang kasar, dan memiliki daya tampung air yang rendah. Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Ayah saja.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terdiri dari 22 kecamatan. Setiap daerah di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan. Wilayah bagian utara merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi meliputi Kecamatan Sempor, Karanggayam, dan Sadang. Wilayah bagian tengah berupa dataran rendah meliputi Kecamatan Rowokele, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Alian, Prembun, Kutowinangun, Adimulyo, dan Kuwarasan. Sementara itu, wilayah selatan merupakan daerah pesisir pantai meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.

Faktor penduduk mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial, sebaliknya keadaan ekonomi dan sosial juga mempengaruhi perkembangan penduduk. Penduduk Kabupaten Kebumen sebagian besar merupakan etnis Jawa dengan latar belakang kebudayaan Jawa. Jumlah penduduk pada tahun 1954 jumlah penduduk mencapai 754.673 jiwa, sedangkan pada tahun 1955

jumlah penduduk mencapai 764.726 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan. Jumlah Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen disebabkan juga oleh adanya perpindahan masyarakat asing yang terjadi. Penduduk pribumi merupakan mayoritas masyarakat Kabupaten Kebumen, sedangkan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 1956 warga negara asli Indonesia mencapai 760.478 jiwa, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 362.679 jiwa dan jumlah perempuan mencapai 396.799 jiwa. Selain itu, penduduk di Kabupaten Kebumen keturunan Tionghoa mencapai 3.496 jiwa dengan perbandingan laki-laki mencapai 1.712 jiwa dan perempuan mencapai 1.784 jiwa.

Penduduk di Kabupaten Kebumen pada umumnya hidup dalam kebersamaan baik dalam hal kegiatan ekonomi, sosial, maupun dalam hal keagamaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen memeluk agama Islam. angka populasi penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 80%, sedangkan 20% lainnya seperti agama Konghucu, Katolik, Protestan, dan Buddha. Agama dipandang dari sudut sosial yang merupakan fenomena kultural dalam kehidupan manusia. Sarana peribadahan yang terdapat di Kabupaten Kebumen pada tahun 1973, yakni masjid terdapat 733 bangunan, musholah terdapat 2.763 bangunan, gereja terdapat 49 bangunan, dan klenteng terdapat 6 bangunan.<sup>13</sup>

Pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan dapat mempengaruhi dalam pembangunan masyarakat. Proses meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam artian meningkatkan mutu kehidupan dalam segi materi dan spiritual memerlukan berbagai kebutuhan pokok salah satunya yaitu pendidikan. Ketersediaan sarana pendidikan diharapkan memberikan pengaruh yang positif dalam kemajuan sumber daya manusianya.<sup>14</sup> Perkembangan jumlah penduduk yang setiap

<sup>13</sup>Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kebumen dalam Angka 1973*, (Kebumen: Kantor Statistik Kabupaten Kebumen, 1973), hlm. 70.

<sup>14</sup>Maftuchah Yusuf, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kepedulukan Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*, (Jakarta: tp, 1986), hlm. 19.

tahunnya mengalami peningkatan harus diimbangi dengan kualitas sarana dan prasarana yang memadai seperti, penyediaan sarana pendidikan.

Strategi pembangunan dilakukan oleh pemerintah untuk produksi pertanian yang memadai secara efektif dalam memecahkan permasalahan mengenai kemiskinan. Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia mengarah dalam peningkatan produksi bahan pangan berupa beras. Kelangsungan strategi dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian yang menekankan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat. Tingkat pemenuhan kebutuhan pangan yang masih belum stabil dan terjadinya ketidakseimbangan bahan pangan yang hanya mengutamakan hasil produksi padi saja. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat pedesaan juga mengandalkan hasil produksi pangan berupa tanaman palawija dalam memenuhi kebutuhannya. Keadaan susunan makanan di masyarakat yang serba kekurangan ditandai dengan ketergantungan pada sifat musiman produksi bahan pangan.<sup>15</sup>

Masyarakat yang hidup dalam kehidupan yang serba keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan utamanya seperti pangan, sandang, dan papan. Manusia pada dasarnya selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, termasuk kebutuhan penting maupun tidak berdasarkan kemampuan setiap individu. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk kelangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan dasar pada masyarakat memerlukan pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.<sup>16</sup>

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Kebumen pada dasarnya bergantung kepada alam. Kehidupan masyarakat desa menitikberatkan pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan satu-satunya penghasil

dari masyarakat di pedesaan. Produksi di sektor pertanian sangat tergantung kepada lingkungan dan juga kepada alam sehingga hasilnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Masyarakat Kabupaten Kebumen kurang potensial dalam kegiatan pertanian sehingga hasil produksi pangan kurang menjamin kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pertanian masyarakat pada dasarnya hanya mengandalkan musim penghujan.<sup>17</sup>

Masyarakat Kabupaten Kebumen mengandalkan sawah tadah hujan dalam kegiatan pertaniannya. Selain menanam padi, masyarakat juga menanam tanaman palawija yang paling banyak ditanam oleh masyarakat karena kekurangan pengairan dan hanya mengandalkan musim penghujan. Ketersediaan air di Kabupaten Kebumen ketika musim penghujan sangat melimpah di mana sering terjadi banjir di beberapa daerah akibat luapan Sungai Luk Ulo. Berbeda dengan musim penghujan, ketika musim kemarau berbanding terbalik yang mana dalam kegiatan pertanian masyarakat kekurangan air.

Kondisi pertanian di Kabupaten Kebumen memiliki permasalahan sendiri dalam setiap tahunnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pertanian di Kabupaten Kebumen berupa serangan hama tikus dan bahaya kekeringan. Permasalahan tersebut menghambat masyarakat dalam melakukan produksi. Masyarakat Kabupaten Kebumen melakukan gotong royong dalam upaya mengatasi masalah tersebut.

## **B. PROSES PEMBANGUNAN WADUK SEMPOR 1958 - 1978**

Salah satu upaya dalam meningkatkan pertanian dengan sistem irigasi yaitu dengan dibangunnya sebuah waduk. Pembangunan waduk pada dasarnya mempunyai keuntungan tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian.<sup>18</sup> Hal tersebut karena adanya pandangan bahwa kegiatan pertanian menjadi sektor yang dianggap sangat menguntungkan bila mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

<sup>15</sup>Karl Heinz W. Bechtold, *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hlm. 2.

<sup>16</sup>Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 2.

<sup>17</sup>*Penerangan dan Pengetahuan*, No. 2 Tahun ke VII, Februari 1957, hlm. 11.

<sup>18</sup>John S. Ambler, *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 11.



Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pertanian diharapkan dapat ditingkatkan untuk mempermudah petani memproduksi hasil pertanian. Salah satu waduk yang dibangun oleh pemerintah yaitu Waduk Sempor tepatnya di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pembangunan Waduk Sempor dilakukan dengan dasar kondisi geografis yang memungkinkan untuk dibuatnya waduk. Pembangunan Waduk Sempor merupakan pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kurangnya sumber air yang menjadi sumber utama dalam keberlangsungan sektor pertanian yang mana sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Kebumen. Sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Sempor, dalam kegiatan irigasi masyarakat mengandalkan terhadap sungai-sungai besar disekitar.<sup>19</sup>

Pasca Kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya tahun 1950 Pemerintah Indonesia melakukan proses identifikasi pembangunan yang dikenal dengan Proyek Sempor. Pada masa kepemimpinan Soekarno dilakukan penelitian kembali di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin dalam rencana pembangunan bendungan tersebut. Proses penelitian yang telah dilakukan menghasilkan gambaran, bahwa waduk nantinya akan dibuat bendungan setinggi 45,5 meter dengan daya tampung air sebesar 68.000.000 m<sup>3</sup>. Adanya hasil penelitian tersebut, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan Waduk Sempor pada tahun 1958.

Alasan pemilihan pembangunan waduk berada di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin karena di daerah tersebut terdapat sungai besar yaitu Sungai Cincingguling dengan dua anak-anak Sungai Sampang dan Sungai Kedungwringin. Pembangunan Waduk Sempor dalam setiap perkembangannya mengalami perluasan. Dilihat dari saluran induk, pada tahun 1961 memiliki luas sejumlah 3.000 ha. Memasuki tahun 1962, saluran induk pada Waduk Sempor mengalami kenaikan dua kali lipatnya dengan jumlah 6.000 ha. Di samping itu, rencana pendapatan perluasan sawah pada

Waduk Sempor juga mengalami fluktuasi atau penurunan dan kenaikan antara tahun 1960-1962. Pada tahun 1960, rencana pendapatan perluasan sawah berjumlah Rp. 8.000.000. Dalam periode berikutnya, rencana pendapatan tersebut naik menjadi Rp. 18.000.000 dengan luas 2.650 ha. Pada tahun setelah rencana pendapatan tersebut mengalami penurunan sejumlah Rp. 13.000.000, dengan perluasan berjumlah 3.350 ha. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dari rencana pendapatan tersebut pada akhir tahun 1962, yakni Rp. 39.000.000 dengan luas 6.000 ha.<sup>20</sup>

Pada tahun 1958 merupakan awal dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan seperti dilakukannya pembuatan jembatan beton dan perbaikan jalan masuk untuk mempermudah proses jalannya pembangunan. Pembuatan bangunan-bangunan untuk penyelenggara dan pembelian tanah area yang akan digenangi air dengan tanaman-tanamannya. Pembangunan Waduk Sempor mengakibatkan beberapa tanah yang akan tergenang mengakibatkan masyarakat di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin harus dibebaskan. Kegiatan pembebasan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan dibentuk panitia pelaksana ganti rugi. Proses ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan Proyek Waduk Sempor dilaksanakan pada tahun 1959. Pembentukan panitia untuk pelaksanaan ganti rugi sudah dilaksanakan pada tahun 1958 dan proses ganti rugi tanah masyarakat pada tahun 1959.

Permasalahan tanah mempunyai fungsi sosial yang rawan dan sering menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat, sehingga proses ganti rugi dilaksanakan dengan bijak. Pemberian ganti rugi tanah dilakukan terhadap barang-barang yang dimiliki penduduk seperti tanah, tanaman, serta bangunan rumah. Namun, barang-barang milik penduduk seperti hewan peliharaan dan bangunan umum tidak mendapat uang ganti rugi oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan ganti rugi tanah dilakukan musyawarah dan koordinasi yang baik dengan

---

<sup>19</sup>Sinah, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018.

---

<sup>20</sup>Dinas Perpustakaan dan Arsip Jawa Tengah, Daftar subangan Begroting Pekerjaan Pengairan Negara Tahun Kerja 1960 untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah.

kepala daerah serta instansi setempat. Pembebasan tanah pada tahun 1958 dengan dilakukan sebaik-baiknya dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta dengan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat yang terkena pembebasan.

Panitia ganti rugi lahan proyek Waduk Sempor dibentuk oleh pemerintah dengan beranggotakan enam orang yaitu R. Ismail sebagai ketua ganti rugi lahan, R. Toerhadi sebagai wakil ketua yang merangkap menjadi sekretaris, Moch Djamil sebagai anggota pelaksana, Soerito Soemoatmodjo sebagai anggota pelaksana, Marsito sebagai anggota, dan R. Koestidjo sebagai anggota pelaksana ganti rugi lahan proyek.<sup>21</sup> Hasil ganti rugi dari pemerintah yang didapat atas imbalan, yakni berupa uang kepada penduduk dari barang yang dimiliki untuk pembangunan Waduk Sempor. Hasil uang yang didapat oleh penduduk dari ganti rugi tanah yang terkena proyek Waduk Sempor nantinya digunakan untuk membeli tanah baru di sekitar waduk yang tidak terkena proyek pembangunan. Besarnya uang ganti rugi yang diperoleh masyarakat tergantung dari jumlah tanah dan dilihat dari lokasi wilayah yang tergusur untuk pembangunan.<sup>22</sup>

Dalam proses ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Sempor di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp. 930.154.440 untuk sawah, tegalan, pekarangan, dan pemindahan rumah.

Proyek Waduk Sempor merupakan suatu Proyek Departemen Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat sekitar waduk yang nantinya berfungsi sebagai irigasi, pengendalian banjir, PLTA (Pembangunan Listrik Tenaga Air), perikanan, dan pariwisata. Pembangunan ini dipersiapkan sejak tahun 1958 dan pelaksanaan mulai dilakukan akhir tahun 1960. Pembangunan

pertama proyek Waduk Sempor dilakukan oleh pemborong CV Barda dengan pemimpin proyek tersebut adalah Ir. R.M. Soedibjo dan dibantu oleh pekerja-pekerja lokal masyarakat sekitar pembangunan proyek.<sup>23</sup>

Proses pembangunan memakan waktu yang sangat lama hingga memasuki tahun ke-8 belum bisa meneruskan pembangunan meskipun bendungan pengelak (*Confferdam*) dan terowongannya sudah selesai. Adanya tumpungan air oleh bendungan pengelak tersebut sudah dimanfaatkan dan dioperasikan untuk irigasi. Namun pada tanggal 27 November 1967 bendungan pengelak tersebut runtuh akibat banjir yang melimpah sampai ke atas badan bendungan (*Overtop*). Keruntuhan bendungan ini mengakibatkan banjir bandang yang terjadi ketika malam hari pukul 21:30 WIB dengan menelan korban sebanyak 127 jiwa. Kejadian tersebut ketika curah hujan tinggi terjadi di sekitar wilayah Desa Sempor tersebut. Korban jiwa yang merupakan warga di sekitar Waduk Sempor mengalami duka yang sangat mendalam dengan adanya bencana tersebut.<sup>24</sup>

Musim bencana banjir akibat Waduk Sempor di Kabupaten Kebumen tersebut menyebabkan terjadinya kerugian moral dan material yang sangat besar bagi penduduk di hilir bendungan sempor. Untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, disamping untuk menunjukkan konsekuensi pemerintah dalam mengatasi masalah di kedu selatan, bendungan sempor kembali dibangun ulang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto masuk dalam Repelita I (1969/1970-1973-1974).<sup>25</sup>

Penyelidikan geologi teknik dilakukan dengan lebih intensif pada tahun 1968 oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Air (LPMA) Bandung, baik dilokasi bendungan maupun dilokasi kuari krumpit. Pada tahun 1969 pemerintah melanjutkan pembangunan Waduk Sempor dengan membentuk badan pelaksana Proyek Waduk Sempor yang dipimpin oleh Ir. Oehadiyono. Melalui tender internasional terpilih konsultan *Nippon Koei* untuk

<sup>21</sup>Kantor Arsip BVWS SO Waduk Sempor, Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman 1958, Departemen PU Irigasi Proyek Kedu Selatan 1958.

<sup>22</sup>Sartono Kartodirdjo, dkk., *Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm 8.

<sup>23</sup>UGM, *Proses Peradilan Waduk Sempor*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1968), hlm. 69.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Tp, "20 Tahun Indonesia Merdeka V", hlm. 694.



melaksanakan perencanaan bendungan. Perencanaan bendungan berlangsung selama kira-kira lima tahun dengan menghasilkan kombinasi konstruksi bendungan yang terdiri atas bendungan urugan batu dengan inti tegak dari tanah, serta bendungan beton di tumpuan sebelah kiri. Nippon Koei Co. Ltd., dari Jepang ini juga bertanggung jawab atas supervisi pelaksanaan pekerjaan bendungan. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh kontraktor PT. Utama Karya dan Ohbayashigumi Corp. pada tahun 1974-1978 bersama sub kontraktor dari daerah sekitar.

Tragedi jebolnya bendungan Sempor ini menjadi duka yang sangat dalam bagi masyarakat sekitar Waduk Sempor. Bencana tersebut terjadi pada tanggal 27 November 1967 dengan memakan korban jiwa sebanyak 127.<sup>26</sup> Proyek Waduk Sempor telah memakan banyak korban jiwa tersebut akibat kelalaian pegawai yang bernama Harjono dengan jabatan sebagai pembantu pelaksana bidang operation yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur pintu air di menara Proyek Waduk Sempor. Harjono merupakan pegawai berumur 35 tahun yang memiliki pengalaman luas dan juga pendidikan yang cukup didapat dari Akademi Teknik P.U.T. (ATPUT) Bandung dan di luar Negeri yaitu RRT yang dianggap sudah baik dalam teknik pengairan. Beliau diangkat sebagai pegawai Proyek Waduk Sempor berdasarkan surat Keputusan Menteri Pengairan Dasar No: Dp.6/1/16 tanggal 13 Januari 1966 dan surat tugas No: 45/Deperdas/1966 tanggal 14 Januari 1966 atas nama Menteri Pengairan Dasar Pembantu Menteri IV.<sup>27</sup>

Pegawai Proyek Waduk Sempor bernama Harjono merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas tragedi jebolnya bendungan Sempor tersebut. Kelalaian yang dilakukan sebelum terjadinya bencana atas tindakannya yang telah mengetahui taraf pada bendungan Waduk Sempor Peilnya telah mencapai lebih 38 dan membiarkan pintu air bendungan sempor dalam posisi hanya terbuka 0,50 meter. Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah tersebut mengakibatkan debit air yang masuk kedalam Waduk Sempor tersebut terus meningkat, dan tidak sebanding dengan air

yang keluar lewat pintu terowongan dikarenakan pintu air hanya terbuka 0,50 meter. Kondisi tersebut membahayakan stabilitas *cofferdam* pada Waduk Sempor tersebut.

Pada pukul 13.00 peil waduk naik hingga 36 dan terus bertambah sehingga pada pukul 16.00 peil waduk mencapai 38. Kondisi tersebut mengakibatkan pada pukul 21.30 permukaan air waduk melampaui puncak *cofferdam* dan melampaui perapat beton yang tingginya 42.50 meter.<sup>28</sup> Hal itu mengakibatkan perapat beton merembes lebih dahulu dari bagian sebelah timur sehingga menyebabkan rusaknya atau hancurnya badan bendungan dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitar waduk.

Bencana yang terjadi akibat kerusakan Proyek Waduk Sempor dan menyebabkan banjir tersebut menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat. Akibat tragedi jebolnya waduk mengakibatkan rusaknya jalur kereta api sepanjang 1 km sehingga menghambat pengangkutan kereta api untuk beberapa hari memakan korban jiwa sebanyak 127 orang dan rusaknya sawah maupun tanaman seluas 11 ha, dan juga hancurnya 1.138 rumah warga masyarakat sekitar yang terkena bencana akibat jebolnya Proyek Waduk Sempor tersebut. Kerugian yang dirasakan masyarakat akibat bencana tersebut sangat kompleks atau menyeluruh.<sup>29</sup>

Kejadian tersebut mengakibatkan Harjono harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukan. Harjono di hukum 9 tahun tahun berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Saksi yang diundang dalam persidangan Kabupaten Kebumen pada tanggal 13 Juli 1968. Tuduhan yang diterima oleh terdakwa Harjono bahwa dengan sengaja menimbulkan banjir dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Keputusan yang telah ditetapkan dan diumumkan pada persidangan serta ditanda tangani oleh Paul Wardoyo S.H. sebagai ketua sidang (Hakim Ketua), Soewarno S.H. sebagai anggota (Hakim

<sup>26</sup>Yogi Yanuar, Wawancara Tanggal 25 Juli 2018.

<sup>27</sup>UGM,*op.cit.*, hlm. 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>29</sup>Darmaji, Wawancara Tanggal 12 Februari 2018.

Anggota), Soetjipto B.A. sebagai anggota (Hakim Anggota).<sup>30</sup>

### C. DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN WADUK SEMPOR BAGI MASYARAKAT KEBUMEN

Proses pembangunan Waduk Sempor menimbulkan dampak besar, salah satunya dalam bidang sosial sebagai hasil dari sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dampak primer pembangunan Waduk Sempor meliputi terjadinya perubahan lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan luas pemilikan lahan. Banyaknya pembangunan proyek bendungan bertenaga air dalam skala besar di negara berkembang khususnya yang terjadi di Desa Sempor merupakan faktor yang menyebabkan tergesurnya masyarakat dari wilayah mereka. Masyarakat yang dipindah dari desa tersebut kehilangan sumber daya di tempat asal mereka, dan mendapatkan sumber daya baru dari lokasi tempat mereka pindah. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi setelah dibangunnya Waduk Sempor sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Adanya pembangunan sarana irigasi untuk pertanian masyarakat mengubah hubungan sosial yang ada seperti mulai berfungsinya kelompok tani masyarakat secara optimal. Kelompok tani merupakan suatu himpunan atau sekumpulan kalangan petani yang memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dengan peningkatan hasil produksi pertanian.<sup>32</sup>

Masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan irigasi Waduk Sempor ini mulai menjalankan fungsi dari kelompok-kelompok tani setiap desa. Kelompok tani tersebut bertujuan untuk mengorganisasi para petani dalam meningkatkan produksi beras dari hasil pertanian. Salah satu nama kelompok tani di Kecamatan Sempor yaitu Sri Rahayu. Para petani sebelumnya hanya mengandalkan sawah tadah hujan dan hanya dapat menanam padi satu kali dalam satu tahun, akan tetapi setelah

adanya pembangunan Waduk Sempor di Kabupaten Kebumen ini masyarakat petani dapat menanam padi dua kali dan palawija satu kali dalam satu tahun. Hal tersebut memberikan keuntungan dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa pembangunan dalam sektor pertanian telah diberi prioritas yang tinggi secara resmi sejak dicapainya kemerdekaan. Tujuan utama dalam proses pembangunan dalam sektor pertanian yang dilakukan oleh pemerintah yakni dalam rangka tercapainya swasembada beras. Oleh sebab itu, banyak dari para petani menggunakan air dari sistem irigasi pemerintah dengan tidak dipungut bayaran. Tujuan lainnya yaitu guna memberikan fasilitas untuk menyejahterakan masyarakat petani yang masih mengalami ketertinggalan.<sup>33</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya menunjang peningkatan hasil produksi pertanian yaitu dengan sistem irigasi. Selain itu juga dilaksanakan program pemerintah dengan nama program bimas dan inmas dalam kelompok tani. Program tersebut memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai kegiatan pertanian dengan teknologi baru yang lebih efisien seperti penyediaan pupuk, penanaman varietas padi unggul, dan pemberantasan hama. Informasi mengenai teknik-teknik pertanian yang baik dalam pertanian ataupun mengenai ketersediannya pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian juga disampaikan kepada masyarakat.<sup>34</sup> Dinas penyuluhan pertanian dari pemerintah nantinya bertugas memberikan informasi mengenai kegiatan pertanian yang baik dengan adanya kelompok tani. Terciptanya kemajuan dalam bidang pertanian dengan sistem irigasi tersebut merupakan kegiatan sosial yang baik sebagai

---

<sup>33</sup> Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op. cit.*, hlm 162.

<sup>34</sup> Robert C. G. Varley, *Masalah dan Kebijakan Irigasi: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993), hlm. 13.

---

<sup>30</sup>UGM.,*op.cit.*, hlm 148.

<sup>31</sup>Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *op. cit.* hlm. 23.

<sup>32</sup>Mandikromo, Wawancara Tanggal 12 April 2018.



rencana untuk mencapai swasembada pangan di kalangan masyarakat.<sup>35</sup>

Perubahan kehidupan masyarakat yang terjadi akibat adanya pembangunan waduk mengubah mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian berganti menjadi sektor non pertanian. Masyarakat Desa Sempor dulunya mengandalkan perekonomian dari pertanian dengan menghasilkan berbagai macam bahan pangan untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk diperjual-belikan di pasar Desa Sempor yang menjadi pusat perekonomian masyarakat sekitar. Namun, penggunaan lahan masyarakat yang sudah digunakan untuk pembangunan waduk menyebabkan lahan masyarakat baik sawah ataupun lahan tegalan yang menjadi tumpuan perekonomian telah berubah. Perubahan mata pencaharian masyarakat ditandai dengan masyarakat yang awalnya sebagai petani berubah menjadi buruh tani semakin banyak.<sup>36</sup> Hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah buruh tani yang terjadi akibat penyempitan lahan pertanian dari adanya waduk. Namun, selain meningkatnya buruh tani terdapat juga buruh atau kuli bangunan untuk menyambung kehidupan masyarakat. Perbedaan kelas sosial yang terjadi dikalangan masyarakat mengakibatkan kesenjangan sosial dalam pola perilaku dan pola pikir masyarakat satu dengan lainnya.<sup>37</sup>

Petani penggarap mengalami penurunan setelah dibangunnya waduk akibat banyaknya sawah di Desa Sempor dan Desa Kedungwringin beralih fungsi menjadi waduk. keadaan tersebut menjadikan masyarakat yang kehilangan lahan sawah dalam kegiatan pertanian harus beralih menjadi buruh petani maupun buruh serabutan lainnya. Hal tersebut jumlah petani penggarap sesudah adanya pembangunan waduk mengalami penurunan sebesar 2.78%. Namun, kenaikan jumlah buruh tani mengalami kenaikan sebesar 2.06% dari sebelum dibangunnya Waduk Sempor. Selain

itu, masyarakat tidak sedikit yang beralih pekerjaan seperti menjadi pedagang, maupun sebagai buruh serabutan.

Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar akibat pembangunan Waduk Sempor mendapat perhatian dari pemerintah yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan perhatiannya terhadap masyarakat sekitar waduk dengan pengembangan potensi-potensi yang positif di kawasan Waduk Sempor baik dalam pengembangan sektor pertanian seperti irigasi maupun sektor pariwisata. Pembangunan irigasi memiliki fungsi yaitu menunjang pembangunan pertanian. Irigasi juga memberikan harapan untuk petani dengan dibarenginya teknologi pertanian seperti pupuk, pemberantas hama, penggunaan varitas unggul.

Pembangunan Waduk Sempor yang terdapat di Kabupaten Kebumen ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti dalam kegiatan Irigasi, perikanan, pariwisata, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kapasitas Waduk Sempor yang mampu mengairi areal persawahan seluas 6.478 Ha di daerah Kecamatan yang berada di sekitar Waduk Sempor yang membuat semakin subur nya lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dalam proses *suplesi* irigasi dibagi menjadi dua yaitu Sempor Barat mencapai 5.978 Ha, sedangkan Sempor Timur seluas 500 Ha. Berfungsinya Waduk Sempor dalam kegiatan irigasi ini dapat mengairi sepanjang musim sehingga masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sawah tadah hujan dalam pertanian. Berikut saluran irigasi Waduk Sempor setelah pembangunan selesai tahun 1978.

Sebelum pembangunan Waduk Sempor, kegiatan pertanian masyarakat hanya menggantungkan satu musim yaitu musim penghujan. Selain mengandalkan sawah tadah hujan masyarakat juga mengandalkan sungai-sungai yang ada dengan bergotong royong membendung sungai agar tercukupinya kebutuhan air dalam kegiatan pertanian, akan tetapi usaha yang dilakukan masyarakat tersebut tidak optimal karena masih banyak sawah yang tidak mendapat aliran air tersebut. Permasalahan yang sering timbul dalam kegiatan pertanian telah meresahkan warga, hal tersebut karena masyarakat sebagian besar

<sup>35</sup>Suparmoko M., Pengembangan Pengairan dalam Strategi Pangan, *Prisma*, (No.1, Oktober, 1981), hlm. 37.

<sup>36</sup>Watimah, Wawancara Tanggal 25 Juli 2018.

<sup>37</sup>Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 86.

berprofesi sebagai petani dan padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat.

Setelah adanya pembangunan Waduk Sempor ini telah memberikan keuntungan terhadap masyarakat petani. Daerah persawahan di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dengan hasil produksi yang semakin meningkat dengan ketersediaan air yang baik dan tercukupi. Keberhasilan pembangunan irigasi tersebut ditandai dengan penanaman padi yang sebelum adanya waduk hanya satu kali tanam dalam satu tahun, tetapi setelah adanya waduk masyarakat petani dapat melakukan tanam padi dua kali dalam satu tahun dan satu kali tanam palawija di areal persawahan.<sup>38</sup>

## KESIMPULAN

Pembangunan waduk di Kabupaten Kebumen dipengaruhi kondisi geografis yang cocok. Wilayah Kabupaten Kebumen meliputi dataran rendah, dataran tinggi, dan juga daerah perbukitan. Kondisi wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang merupakan hamparan sawah sebagai lahan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya mengembangkan kegiatan pertanian masyarakat menjadi alasan pembangunan waduk demi menunjang tersedianya air dalam kegiatan irigasi.

Kondisi pertanian di Kabupaten Kebumen sebelum pembangunan Waduk Sempor mengalami keterbatasan sumber air dalam kegiatan irigasi pertanian. Masyarakat petani hanya mengandalkan sawah tadah hujan dan menggunakan irigasi tradisional dengan cara bergotongroyong membendung sungai. Namun, hal tersebut belum sesuai harapan petani dikarenakan irigasi tradisional tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi dalam kegiatan pertanian masyarakat. Usaha yang dilakukan masyarakat petani tidak memberikan perubahan dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, dikarenakan masyarakat petani hanya dapat menanam padi hanya satu kali dalam satu tahun.

Pembangunan waduk di Kabupaten Kebumen sangat cocok dengan kondisi geografis yang strategis. Keberadaan Pegunungan Serayu Selatan dan adanya sungai

besar Cincing Guling dengan dua anakan Sungai Sampang dan Sungai Kedungringin yang berada di wilayah bagian utara menjadi faktor penunjang dalam pembangunan bendungan. Tersedianya air sungai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan pengairan di daerah tersebut. Melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan untuk meningkatkan pembangunan khususnya di bidang pertanian. Pembangunan dilaksanakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana irigasi di Kabupaten Kebumen yaitu dengan di bangunnya sebuah Waduk Sempor.

Realisasi pembangunan pada tahun 1960 di mulai dengan kontraktor CV Barda dengan pemimpin Ir. R.M. Soediby, tetapi pembangunan tersebut tidak berjalan lancar. Selama proses pembangunan waduk, tepatnya pada tanggal 27 November 1969 pukul 21:30 terjadilah jebolnya waduk akibat debit air yang meningkat akibat hujan deras yang mengguyur dan memakan korban jiwa sebanyak 127 jiwa. Kondisi tersebut memberikan kerugian material dan moral sehingga memberikan duka yang sangat mendalam bagi masyarakat sekitar dan pemerintah.

Pembangunan kedua dilanjutkan pada Repelita I (1969/1970-1973-1974) pada pemerintahan Presiden Soeharto. Penyelidikan geologi teknik dilakukan dengan lebih intensif pada tahun 1968 oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Air (LPMA) Bandung, baik di lokasi bendungan maupun di lokasi kuari krumpit. Pada tahun 1969 pemerintah melanjutkan pembangunan Waduk Sempor dengan membentuk badan pelaksana Proyek Waduk Sempor yang dipimpin oleh Ir. Oehadiyono. Melalui tender internasional terpilih konsultan Nippon Koei untuk melaksanakan perencanaan bendungan. Perencanaan bendungan berlangsung selama kira-kira lima tahun dengan menghasilkan kombinasi konstruksi bendungan yang terdiri atas bendungan urugan batu dengan inti tegak dari tanah, serta bendungan beton di tumpuan sebelah kiri. Nippon Koei Co. Ltd., dari Jepang ini juga bertanggung jawab pelaksanaan pekerjaan bendungan. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh kontraktor PT. Hutama Karya dan Ohbayashigumi Corp pada tahun 1974-1978 bersama sub kontraktor dari daerah sekitar.

<sup>38</sup> Robert C.G. Varley, *op. cit.*, hlm.



Proses pembangunan Waduk Sempor telah memakan waktu yang begitu lama dan menelan korban jiwa, sehingga pada tanggal 1 Maret 1978 Waduk Sempor dapat diresmikan yang ditandai dengan ditandatangani prasasti oleh Presiden Soeharto. Prasasti tersebut tertulis "Tirta Udadha Sarwa Adiguna Pariboga, Paradipta, Parimina, Pariwisata" yang menunjukkan fungsi air waduk yang serbaguna di antaranya untuk pangan, ikan dan pariwisata.

Pembangunan Waduk Sempor berdampak pada terbentuknya kelompok tani, dan proses mobilitas sosial. Terbentuknya kelompok tani bertujuan memberikan pengalaman dan kepercayaan yang perlu untuk meningkatkan juga memberi kemajuan dan pengetahuan untuk para petani dalam mencapai swasembada beras. Selain terbentuknya kelompok tani, pembangunan waduk juga berdampak pada proses mobilitas sosial. Hal demikian disebabkan karena banyak dari masyarakat yang dipindahkan dari Desa Sempor ke desa-desa sekitarnya seperti Desa Kaliputih dan Desa Tunjungseto. Pemindahan ini dilakukan karena jumlah penduduk dua desa tersebut masih rendah. Hal demikian mengakibatkan terjadinya perubahan sosial masyarakat seperti perubahan masyarakat yang pada awal sebelum pembangunan waduk masyarakat berprofesi sebagai petani dengan lahan sawah yang dimiliki, akan tetapi setelah lahan mereka tergusur dengan adanya pembangunan Waduk Sempor mengakibatkan masyarakat menjadi buruh pertanian.

Dampak ekonomi pembangunan Waduk Sempor selain sebagai sistem irigasi juga bertujuan untuk budidaya ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kebumen dengan memberikan bibit ikan di Waduk Sempor. Hal tersebut memberikan keuntungan dan menyejahterakan masyarakat melalui penangkapan ikan dengan cara memancing di sekitar waduk secara bebas. Pembangunan Waduk juga bermanfaat sebagai pariwisata, di mana pemanfaatan sebagai objek pariwisata ini digunakan untuk pemasukan pendapatan pemerintah Kabupaten Kebumen. Pengelolaan daerah kawasan Waduk Sempor sebagai objek pariwisata ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen dan di bantu oleh masyarakat sekitar waduk. Pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas dalam menunjang pariwisata untuk

menarik minat pengunjung. Selain itu, waduk juga bermanfaat untuk pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyediaan air minum ditujukan untuk daerah Kecamatan Gombong, Karanganyar, dan Kebumen sebanyak 100 lt/detik. PDAM ini memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia, Pidato Presiden RI 1966-1988, Sambutan Pada Upacara Peresmian Bendungan dan Jaringan Irigasi Sempor, Pada Tanggal 1 Maret 1978, Di Sempor.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, UU RI No 11 Tahun 1971, Pengairan dan Pengetrapannya.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 46/HOT/79, Pelaksanaan Pengairan Secara Golongan di Dataran Karanganyar.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, Sumbangan Begroting Pekerjaan Pengairan Negara Tahunn Kerdja 1960 untuk Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah berisi tentang Daftar Rekapitulasi Proyek-proyek Repelita Pusat Yang Lokasinya di Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978, Triwulan Ke-IV.

Kantor Arsip BVWS SO Waduk Sempor, Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman 1958, Departemen PU Irigasi Proyek Kedu Selatan 1958.

### Buku:

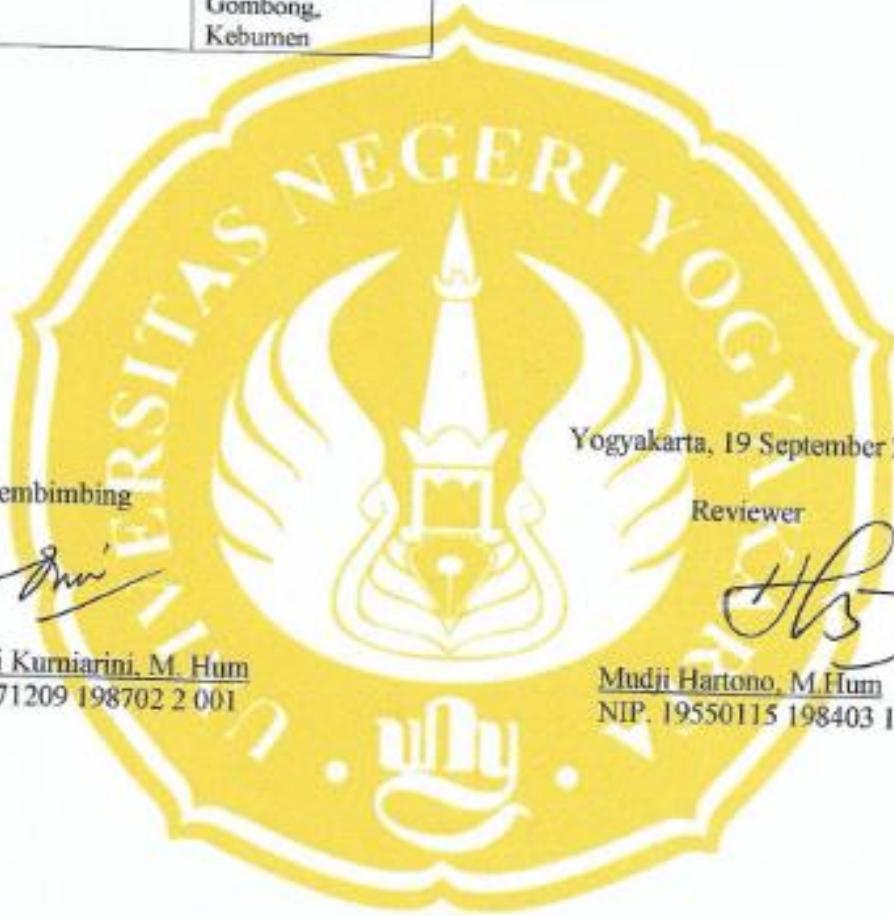
Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.

- Agung Budi Susanto, "Faktor-faktor Sosial Ekonomi Budaya Yang Mempengaruhi Kesiapan Calon Transmigrasi Kabupaten Kebumen Mengikuti Program Transmigrasi", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 1985.
- Amirudin Al-Rahab, *Ekonomi Berdikari Sukarno*, Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildyard, *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- John S. Ambler, *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Kantor Badan Pusat Statistik Kebumen, *Kebumen dalam Angka 1978*, Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 1978.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Karl Heinz W. Bechtold, *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Long Norman, *Pengantar Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1977.
- Maftuchah Yusuf, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kepedulikan Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*, Jakarta: tp, 1986.
- Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Robert C. G. Varley, *Masalah dan Kebijakan Irigasi: Pengalaman Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
- Rantjangan *Undang-Undang Tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*, Biro Perantjang Negara
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996
- Suryana A. dan Hermanto, *Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional Ekonomi Padi dan Beras Nasional*, Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2001
- Robert C. G. Varley, *Masalah dan Kebijakan Irigasi: Pengalaman Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993
- Tp, "20 Tahun Indonesia Merdeka V", UGM, *Proses Peradilan Waduk Sempor*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1968
- Artikel:**
- Denik Kharisma Sari dan Nawiyanto, "Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1945", *Artikel*, Universitas Negeri Jember, 2014
- Penerangan dan Pengetahuan*, No. 2 Tahun ke VII, Februari 1957.
- Suparmoko M., Pengembangan Pengairan dalam Strategi Pangan, *Prisma*, No.1, Oktober, 1981.



**Narasumber:**

No	Nama	Alamat
1	Darmaji	Gombang, Gombang, Kebumen
2	Mandikromo	Kaliputih, Sempor, Kebumen
3	Sinah	Tunjungseto, Sempor, Kebumen
4	Watimah	Kaliputih, Sempor, Kebumen
5	Yogi Yanuar	Gombang, Gombang, Kebumen



Yogyakarta, 19 September 2018

Pembimbing

Dina Dwi Kurniarini, M. Hum  
NIP. 19571209 198702 2 001

Reviewer

Mudji Hartono, M. Hum  
NIP. 19550115 198403 1 011